



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANTONIUS DWI Wianto
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
3. NIK : 135594

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.235.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/54 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 235.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E320 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 228.809.172

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 620.689.926

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.368.999.098

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.368.999.098

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.